

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"
 Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
 dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Dampak Sektor Pariwisata dan Lingkungan Hidup terhadap Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA)

Oktarizka Reviandani^a dan Indira Arundinasari^b

^a UPN "Veteran" Jawa Timur

^b UPN "Veteran" Jawa Timur

e-mail : ^a oktarizka.r.adneg@upnjatim.ac.id ^b Indira.arun.adneg@upnjatim.ac.id

Abstrak

Krisis pada aspek lingkungan dan pembangunan selalu menimbulkan konflik bagi para aktor pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Fokus penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pada kebijakan pembangunan YIA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berdiri pada paradigma interpretatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena perdebatan kebijakan dalam memperjuangkan kepentingan oleh koalisi kontra pada penolakan pembangunan YIA dikarenakan memberikan efek pada sektor pariwisata dan terutama dampak lingkungan. Terbentuknya koalisi kontra yang terdiri dari koalisi utama dan koalisi pendukung ini memiliki pengaruh kuat untuk menarik basis gerakan pendukung yang luas. Kelompok dalam koalisi kontra bersatu didorong oleh sistem keyakinan yang sama, mulai dari keyakinan paling umum hingga spesifik yakni keterikatan erat masyarakat dengan tanah, perspektif pembangunan berpihak pada kepentingan umum dan dampak kebijakan YIA di berbagai aspek. Ketika koalisi kontra sudah terbangun, berbagai kelompok koalisi kontra termotivasi untuk menerjemahkan keyakinan tersebut dalam suatu tindakan kebijakan mulai dari jalur legal formal, komunikasi publik, informasi ilmiah, dan gerakan massa. Berbagai sumber daya dan strategi satu sama lain saling mendukung terutama pada dua aspek yang paling kuat dalam mempengaruhi kebijakan yakni sumber informasi dan sumber daya keuangan.

Kata Kunci: Kebijakan Pembangunan Yogyakarta International Airport, Koalisi Kontra, Lingkungan

Abstract

The crisis in the environmental and development aspects always creates conflict for government, private, and community actors. The focus of this research is to analyze YIA's development policies. This study uses qualitative research methods with an interpretive paradigm. The results of this study indicate that the phenomenon of policy debate in the struggle for interests by the rival coalition over the rejection of YIA development is due to its influence on the tourism sector and in particular the environmental impact. The formation of a counter-coalition consisting of the main coalition and the supporting coalition has a strong influence in attracting a broad base of supporting movements. The groups in the counter-united coalition are driven by a common belief system, ranging from the most general to specific beliefs, namely the community's close attachment to land, a community-friendly development perspective, and the impact of YIA. When the counter-coalition was built, various counter-coalition groups were motivated to translate this belief into policy actions ranging from formal legal channels, public communication, scientific information, and mass movements. Various resources and strategies support each other, especially in the two aspects that are most powerful in influencing policy, namely information sources and financial sources.

Keywords: Yogyakarta International Airport Development Policy, Counter Coalition, Environment.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan agenda pembangunan lima tahun sejak tahun 2015 hingga 2019, kebijakan pembangunan di bidang infrastruktur bertujuan untuk melaksanakan pengembangan wilayah guna mengurangi kesenjangan antar daerah (RPJMN 2015-2019). Sasaran pembangunan infrastruktur dasar dibagi menjadi beberapa bidang diantaranya pembangunan jalan, jalur kereta api, jaringan, pembangkit listrik, peningkatan kelayakan air minum dan sanitasi, pelabuhan hingga penyelesaian proyek pembangunan bandara baru. Pembangunan infrastruktur nasional memiliki spektrum luas terutama di bidang transportasi yang mampu mendorong konektivitas antar wilayah. Kemudahan konektivitas inilah yang kemudian mampu meningkatkan pergerakan ekonomi. Bandara merupakan bagian vital penunjang sarana dan prasarana utama operasi penerbangan dalam peningkatan pertumbuhan akses dan mobilitas transportasi udara. Pembangunan bandara menjadi semakin luas karena keberadaannya yang mampu menggerakkan aspek perekonomian terutama pada pengembangan industri pariwisata dan perdagangan (Bhinadi & Ardhitama, 2019). Salah satunya agenda mega proyek pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia adalah bandara baru yakni Pembangunan Yogyakarta International Airport (selanjutnya disebut YIA) di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Pada tanggal 25 Januari 2011, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Angkasa Pura I sepakat melakukan kerja sama dengan investor dari India, GVK Power & Infrastructure untuk melakukan pembangunan YIA. Pembangunan YIA ini merupakan bagian dari proyek MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang mulai dieksekusi pembangunannya pada masa kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk kemudian disahkan melalui program RPJMN (Kadarisman, 2019). Bandara YIA menjadi pengembangan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta yang sudah dinilai *over capacity*. Hal ini sejalan dengan prioritas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada perluasan penerbangan baik dengan melaksanakan pembangunan maupun

perluasan bandara yang telah ada. Konsep utama pembangunan bandara YIA menggunakan konsep kawasan kota mengelilingi bandar udara yakni Aero City atau Aerotrop yang mampu memperluas dan mendorong percepatan perekonomian terutama melalui bidang pariwisata (Edita, 2019). Sebagai mercusuar perekonomian, pembangunan bandara YIA didukung oleh pertumbuhan pasar maskapai penerbangan Indonesia yang semakin cepat secara global dan kawasan strategis Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ragam potensi wisatanya telah menjadi tujuan yang paling banyak didatangi wisatawan domestik hingga internasional setelah Bali (Tinasar et al., 2017).

Bagian ini membahas teori-teori yang diperlukan untuk memberikan pemahaman akademis. Teori adalah seperangkat proposisi yang telah berinteraksi secara sintaksis, yaitu mengikuti aturan tertentu dapat berhubungan secara logis dengan data yang dapat diamati dan berperan sebagai media untuk memprediksi dan menjelaskan suatu fenomena yang akan diamati (Snelbecker, 1985). Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini akan menjadi gambaran yang berfungsi sebagai dasar penelitian untuk menjawab rumusan masalah dan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian. Teori dalam penelitian ini juga berguna dalam memahami peristiwa dan makna sosial budaya melalui perilaku objek penelitian secara langsung dan rinci. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman dan interpretasi atas tindakan-tindakan tersebut secara kontekstual tergantung pada pemaknaan sebagian orang dalam lingkup sosial. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Teori Jaringan Aktor. Berkembang sejak pertengahan 1980-an melalui penelitian empiris Bruno Latour (1987), Michel Callon (1986), dan John Law (1987). Kerangka konseptual Teori Jaringan Aktor adalah mengeksplorasi proses kolektif dari *sociotechnical*. Teori Jaringan Aktor menggunakan prinsip umum simetri untuk menjelaskan fenomena sosial dan bukan dari pendekatan yang ditentukan secara sosial, baik makro maupun mikro. Menurut Latour (1992:22) topik sentral agen bukanlah struktur mikro atau makro, melainkan proses entitas

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

- berputar sosial. Dengan kata lain, fokus sebenarnya adalah pada jaringan. Teori Jaringan Aktor bukanlah teori sosial tetapi teori ruang yang mengalir dalam situasi modern. Ada beberapa konsep penting dalam Teori Jaringan Aktor yaitu aktor/aktan dan jaringan (networks). Aktor mendefinisikan hubungan antara satu sama lain melalui perantara: aktor yang menciptakan perantara dan menulis makna sosial di dalamnya. Perantara menggambarkan jaringan sambil menyusun jaringan dengan memberi arti pada bentuk (Callon, 1991). Aktor biasanya ditemukan dalam bentuk teks, artefak teknis, uang atau keterampilan manusia. Jaringan adalah hubungan antara manusia, komponen teknologi, kepentingan terkait (Walsham & Sahay, 1999) di Ambar Sari Dewi Institute for Research and Empowerment (IRE). Pada dasarnya, aktor (atau aktan) tidak dapat dipahami terlepas dari jaringan di mana mereka berada dan menjadi bagian darinya. Sebenarnya aktor dan jaringan adalah "dua wajah dari fenomena yang sama" (Latour, 1999:19). Jaringan bukanlah komunitas atau medan kekuasaan (force) yang anonim, tetapi "ringkasan" interaksi melalui berbagai jenis alat, prasasti, bentuk dan formula ke dalam praktik yang sangat lokal, yang lokusnya sangat kecil.
- b) Dinamis Konflik. Pemikiran Dahrendorf dan Coser mempengaruhi pendekatan studi konflik, terutama yang disebut pendekatan primordial dan instrumental. Langkah penting dalam analisis konflik pragmatis adalah pemetaan konflik. Pemetaan konflik memberikan gambaran awal tentang sikap, perilaku, dan situasi yang berkembang dalam dinamika konflik. Sebelum melangkah pada pemahaman tentang dinamika konflik, langkah pertama yang harus diketahui adalah pengertian konflik, jenis konflik dan jenis konflik. Ada dua jenis konflik yaitu yang pertama berdimensi vertikal atau "conflict over" (Stepanova et al., 2020). Yang dimaksud adalah konflik antara elit dan massa (Wittkopf, E. R., & Maggiotto, M. A. 1983). Elit di sini bisa pembuat kebijakan di tingkat pusat, kelompok bisnis atau aparat militer. Yang menonjol dalam konflik ini adalah penggunaan instrumen kekerasan negara, sehingga menjadi korban di kalangan massa (Galtung, 2018). Yang kedua adalah konflik horizontal, konflik inilah yang terjadi di antara massa itu sendiri. Selain jenis konflik, ada jenis konflik yang menggambarkan masalah sikap, perilaku, dan situasi yang ada. (Galtung, 2018)
- c) Lingkungan. Komponen penataan RTH menurut Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Komponen ruang terbuka hijau pada kawasan lindung, dikembangkan pada kawasan yang telah ditetapkan dengan fungsi utama menjaga kelestarian lingkungan yang meliputi sumber daya alam dan buatan. Sedangkan komponen RTH pada Kawasan Budidaya, dikembangkan pada kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk diusahakan berdasarkan kondisi dan potensi manusia serta sumber daya buatan. (Supratiwi, 2019).

B. PEMBAHASAN

Penelitian implikasi praktis ini diharapkan dapat menjadi basis ilmiah bagi seluruh aktor yang terkait dalam kajian kebijakan pembangunan YIA di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Mengingat konflik pembangunan infrastruktur yang berdampak pada persoalan agraria saat ini belum memiliki kebijakan yang berpihak dan menguntungkan bagi masyarakat dalam merespon keberlangsungan hidup secara bersama dalam masalah lingkungan hidup, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran agar kedepannya pemerintah ketika mengimplementasikan kebijakan tidak hanya mampu mempertimbangkan orientasi dan kepentingan negara tetapi juga harus mampu mewadahi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, hasil penelitian ini juga dapat menjadi alat atau instrumen perlawanan guna memotret tindakan-tindakan representatif yang dilakukan pemerintah guna melancarkan jalannya pembangunan infrastruktur tanpa melihat dampak pembangunan jangka panjang yang merugikan masyarakat, seperti halnya dampak suatu bandar udara terhadap tata guna lahan, pada dasarnya karena bandar udara sering

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

memerlukan lahan yang luas. Dampak ini dapat berupa atau berkaitan dengan factor ekonomi, pembangunan, atau visual. Serta polusi udara dan air merupakan dampak lingkungan yang paling serius dan paling kompleks dalam pengembangan dan pengoperasian suatu bandara. Polusi air umumnya berupa limbah, dapat terjadi secara langsung, dari pembangunan dan pengoperasian bandara dan secara tidak langsung, dari pengembangan lahan yang terimbas dengan kehadiran bandara

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Rekomendasi ditujukan kepada pemerintah dan pihak swasta kedepannya ketika merencanakan dan melaksanakan kebijakan, diharapkan terbuka ruang diskusi yang terfokus dengan masyarakat terkait, tidak hanya sebatas sosialisasi dan audiensi. Kedua, Mendorong Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ke depan Dalam proses pelaksanaan kebijakan pembangunan dapat berusaha mengikuti prosedur yang sudah ada serta mengawasi jalannya pembangunan agar kedepannya ada tidak ada kebijakan konflik seperti yang terjadi dalam perkembangan YIA. Ketiga, kajian menyeluruh terhadap analisis dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Keempat, Perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses kompensasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Kelima, Memberikan pendidikan baik pendidikan politik maupun manajerial bagi masyarakat terkait literasi keuangan

REFERENSI

- Bhinadi, A., Didi, R. N., & Nuryadin, A. S. G. A. (2021, May). Tourism Recovery Strategy Towards a New Normal in Yogyakarta 2020. In 2nd International Conference on Business and Management of Technology (ICONBMT 2020) (pp. 242-247). Atlantis Press.
- Edita, E. P. (2019). Aerotropolis: At what cost, to whom? An analysis of social and environmental impacts of New Yogyakarta International Airport (NYIA) project, Indonesia. Master Thesis Series in Environmental Studies and Sustainability Science.
- Galtung, J. (2018). Violence, peace and peace research. *Organicom*, 15(28), 33-56. <https://doi.org/10.11606/issn.2238-2593.organicom.2018.150546>
- Kaufman, S. J. (1996). Spiraling to Ethnic War: Elites, Masses, and Moscow in Moldova's Civil War. *International Security*, 21(2), 108-138. <https://doi.org/10.2307/2539072>
- Rohman, A. T. (2016). Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan. Bandung: Universitas Pasundan. Retrieved from <http://repository.unpas.ac.id/1661/>
- Rosana, D., Kadarisman, N., & Suryadarma, I. G. P. (2019). Sets best practice model: Growth Optimization and productivity of organic food plants through Iasmuspec application. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 8(2), 267-278.
- Stepanova, O., Polk, M., & Saldert, H. (2020). Understanding mechanisms of conflict resolution beyond collaboration: an interdisciplinary typology of knowledge types and their integration in practice. *Sustainability Science*, 15(1), 263-279. <https://doi.org/10.1007/s11625-019-00690-z>
- Supratiwi, S. (2019). Studi ruang terbuka hijau dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 89. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i2.3878>
- Tinasar, Ilan (2017). Evaluation of New Yogyakarta International Airport (NYIA) in Temon District Based on Tsunami Disaster Risk using Geographic Information System (GIS). National Proceeding Muhammadiyah Semarang University.
- Wittkopf, E. R., & Maggiotto, M. A. (1983). Elites and Masses: A Comparative Analysis of Attitudes Toward America's World Role. *The Journal of Politics*, 45(2), 303-334. <https://doi.org/10.2307/2130128>